

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat Madura mempunyai standard hierarki dalam hal kepatuhan yaitu “*Bhuppak Babbhu’ Ghuruh Ratoh*”, dimana ketiga subyek ini merupakan subyek yang harus dipatuhi dan sebagai panutan dalam menjalani kehidupan setiap individunya (Wiyata, 2013:30-31), tak terkecuali dengan Bangkalan. Kepatuhan terhadap *Bhuppak Babbhu’* atau orang tua, *Ghuruh* yang berarti guru atau kyai dan *Ratoh* yang berarti pemimpin sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Figur guru ataupun kyai dijadikan panutan serta rujukan bagi masyarakat Madura dalam aspek-aspek kehidupan terutama dalam aspek keagamaannya, tak terkecuali bagi masyarakat Bangkalan. Kyai sangat berpengaruh dalam membangun masyarakat, menggerakkan massa, bahkan dalam menentukan sikap politik. Kharisma kyai yang begitu besar dalam budaya masyarakat Bangkalan menjadikan kyai sebagai magnet politik yang sering didekati oleh elit politik agar mendapatkan legitimasi dari masyarakat (Abdussalam, 2015). Selain itu kharisma kyai yang menjadi magnet tersebut sering dimanfaatkan untuk mendapatkan kekuasaan oleh beberapa tokoh lokal yang menyandang status kyai.

Raden Kanjeng (dalam penelitian ini, Raden Kanjeng adalah nama samaran bagi mantan Bupati Bangkalan yang pernah menjabat selama dua periode dari tahun 2003-2013) merupakan seorang kyai sekaligus mantan bupati yang berasal dari trah Bani Kholil yang dihormati oleh masyarakat, sehingga masyarakat harus patuh dan tunduk kepadanya. Masyarakat tetap patuh walaupun terdapat penyelewengan dalam penyelenggaraan kekuasaan atau tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh Raden Kanjeng, contohnya ketika ada bakal calon legislatif yang akan mengikuti pemilihan umum harus membayar mahar kepada Raden Kanjeng sebagai syarat untuk bisa memenangkan pemilihan umum tersebut. Dalam hal ini masyarakat mengetahui penyelewengan yang dilakukan, namun tidak berani mengadukan atau melaporkan (Mukti, 2015). Max Weber menjelaskan ada tiga model kekuasaan, yang pertama adalah kekuasaan yang

berbasis karisma yang berpusat pada kualitas pribadi. Yang kedua adalah wewenang tradisional yang diwarisi melalui adat kebiasaan dan nilai-nilai komunal dan yang terakhir adalah wewenang legal formal yang merupakan kekuasaan berbasis pada aturan hukum resmi (Susan, 2009:27). Masyarakat Bangkalan yang masih menganut pola pikir tradisional dimanfaatkan oleh Raden Kanjeng dengan menggunakan wewenang tradisionalnya sebagai trah Bani Kholil untuk mendapatkan wewenang legal formalnya.

Raden Kanjeng menjadi kekuatan dominan dengan memanfaatkan kekuasaannya secara oligarkis. Semua lapisan dalam struktur pemeritahan seperti dalam pembentukan struktur kepemimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berada dalam pengaruh dan kekuatannya. Beliau dengan mudahnya memutasi dan menyingkirkan pejabat daerah yang tidak patuh padanya ke daerah-daerah terpencil (Rozaki, 2016:12). Beliau juga melakukan hipnotis hingga ke akar rumput melalui kekuasaan kyai kepada masyarakat, sehingga dapat mengendalikan cabang kehidupan tertentu. Beliau mampu memainkan peran dan pengaruhnya tersebut untuk menentukan corak dan arah kehidupan (Abdussalam, 2015).

Raden Kanjeng mampu menundukkan blater untuk menyokong kekuasaannya. Kemampuannya menguasai blater ini juga yang membuat masyarakat tidak ada yang berani melawan, bahkan para pengkritik dan pembangkang mendapat terror dari sekelompok orang yang tidak dikenal (Toyudo, 2015). Di Bangkalan setiap desa memiliki Blater. Blater atau yang diibaratkan sebagai pagar desa merupakan sosok orang kuat di Madura baik secara fisik maupun magis dan biasanya dikenal memiliki ilmu kebal pencak silat atau ilmu beladiri (Rozaki, 2009:3). Kemampuannya dalam menundukkan kaum blater ini beliau manfaatkan untuk memantau atau mengawasi gerak-gerik masyarakat yang tidak mau patuh padanya. Hal ini dapat memperkuat kekuasaannya hingga ke tingkat pemerintah yang paling rendah yaitu desa. Pada masa kepemimpinan bupati Bangkalan Raden Kanjeng, banyak sekali pemberitaan di media mengenai tindak kekerasan terhadap aktivis yang terjadi di kabupaten Bangkalan. Kekerasan yang terjadi tetap ada pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Raden Kanjeng yang pada waktu itu menjabat sebagai ketua DPRD Bangkalan. Salah satu kekerasan yang terjadi pada pegiat anti korupsi Mathur Husairi yang ditembak oleh orang misterius, pembacokan yang dialami oleh Fahrillah dan juga aktivis Bangkalan yang lain. Dari hal ini Raden Kanjeng menggunakan sistem yang rapi dalam membangun kekuasaannya dari tingkat pusat hingga ke blater dimasyarakat. Tindakan ini menyebabkan sebuah ketakutan terhadap masyarakat dari sistem yang mengakar hingga sekarang.

Kepatuhan dan ketakutan masyarakat kabupaten Bangkalan sejak masa pemerintahan bupati Bangkalan Raden Kanjeng masih dirasakan hingga pasca kepemimpinannya, mulai dari Raden Kanjeng menjabat sebagai staf ahli bupati, beralih menjadi ketua DPRD Bangkalan hingga ia ditangkap KPK dan dipenjara di Sukamiskin. Ketakutan dalam berbagai hal, bahkan dalam hal menyampaikan pendapat mengenai keterbukaan publik oleh masyarakat kelas menengah kebawah. Masyarakat Bangkalan pada masa kepemimpinan hingga pasca kepemimpinan Raden Kanjeng tidak berani melaporkan beberapa tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh jajaran pemerintahan Bangkalan, masyarakat terkesan patuh dengan instruksi yang diberikan. Selain itu walaupun saat ini raga Raden Kanjeng tidak berada di Bangkalan beliau masih sangat kuat pengaruh serta kharismanya dibuktikan dengan adanya setoran yang masih mengalir ke Raden Kanjeng, banyaknya masyarakat yang menjenguk ke sukamiskin dan keluarnya surat himbauan yang ditulis oleh beliau untuk masyarakat Bangkalan, hal ini seperti menggambarkan konsep *panopticon*. Maka dari latar belakang tersebut peneliti melakukan penelitian kasus adanya sistem yang mengakar hingga sekarang pada masyarakat Bangkalan yang menyebabkan ketakutan. Ketautan-ketakutan ini mengikat dan membayang-bayangi masyarakat Bangkalan seolah-olah masyarakat Bangkalan berada di dalam *panopticon*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut,

1. Bagaimana praktek *panopticon* pasca Raden Kanjeng tidak menjabat sebagai bupati Bangkalan hingga tahun 2017 ?

1.3 Tujuan

Untuk mengetahui praktek *panopticon* pasca Raden Kanjeng tidak menjabat sebagai bupati Bangkalan hingga tahun 2017.

1.4 Manfaat Peneitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Bagi peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan referensi pada penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini.
- b. Bagi peneliti sendiri merupakan hal yang sangat bermanfaat dalam menambah dan memperluas pengetahuan tentang suatu kondisi sosial di Bangkalan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Dapat menjadi masukan bagi masyarakat yang masih takut untuk bergerak atas nama kebumaran. Dengan begitu, masyarakat menjadi semakin kritis akan adanya penyelewengan-penyelewengan di Bangkalan. Jadi, prinsip keterbukaan akses ruang publik bagi masyarakat Bangkalan dapat terbuka dengan seluas-luasnya.
- b. Bagi pemerintah daerah dan instansi-instansi dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan arah kebijakan bagi nasib Bangkalan kedepannya.